

Analisis Pelanggaran HAM yang Terjadi di Korea Utara

Patricia Tanuwijaya*; Dean Trianata; Yosua Hasiholan

Universitas Pradita, patricia.tanuwijaya@student.pradita.ac.id

ABSTRACT: There are many cases of human rights violations that occur in North Korea, such as detention, arrest, and forced labor involving minors, as well as restrictions on freedom of action by the North Korean government. Restrictions on freedom of action by the North Korean government include freedom of speech, freedom to travel abroad, and freedom of access to information. Not only that, the inhumane conditions of detention are also part of the human rights violations committed by the North Korean government. The impact of human rights violations that occur in North Korea has caused many people to experience mental health, such as depression and there are North Koreans who consume illegal drugs such as drugs. With the many cases of human rights violations that have occurred in North Korea, we conducted research with the aim of analyzing the mental health of the North Korean people in conditions where there are many human rights violations, so that this can become a public concern and the problem of human rights violations that occur in North Korea can end soon. In this research, we used a descriptive analytical and normative qualitative method based on a literature study approach. From the results of our research, we found that there are many cases of mental health disorders that occur in North Korean society. Mental health disorders that occurred in North Korean society, such as during the famine that occurred in North Korea in the 1990s. At that time, there was an "Arduous March" which meant doing very hard labor in order to avoid crisis and famine. As a result of this, many North Koreans were traumatized.

KEYWORDS: Human Rights, North Korea, Violations

ABSTRAK: Terdapat banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Korea Utara, seperti penahanan, penangkapan, serta pekerja paksa yang melibatkan anak dibawah umur, juga terdapat pembatasan kebebasan bertindak yang dilakukan oleh pemerintah Korea Utara. Pembatasan kebebasan bertindak yang dilakukan oleh pemerintah Korea Utara meliputi, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk bepergian ke luar negeri, hingga kebebasan mengakses informasi. Tidak hanya itu, kondisi tempat tahanan yang tidak manusiawi juga merupakan salah satu bagian dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Korea Utara. Dampak dari pelanggaran HAM yang terjadi di Korea Utara tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang mengalami kesehatan mental, seperti depresi hingga terdapat masyarakat Korea Utara yang mengonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba. Dengan terdapat banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Korea utara, maka dari itu kami melakukan penelitian dengan bertujuan ingin menganalisis kesehatan mental masyarakat Korea Utara atas kondisi dimana banyaknya terjadi pelanggaran HAM, sehingga hal tersebut dapat menjadi perhatian publik dan

masalah pelanggaran HAM yang terjadi di Korea Utara dapat segera berakhir. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis serta normatif dengan berdasarkan pendekatan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian kami, ditemukan bahwa terdapat banyak kasus gangguan kesehatan mental yang terjadi pada masyarakat Korea Utara. Gangguan kesehatan mental yang terjadi pada masyarakat Korea Utara, seperti pada masa kelaparan yang terjadi di Korea Utara pada tahun 1990-an. Pada masa itu, terdapat "Arduous March" yang dimana artinya merupakan kegiatan melakukan kerja yang sangat keras dengan tujuan terhindar dari krisis dan kelaparan. Akibat dari hal tersebut, banyak warga Korea Utara yang mengalami traumatis.

KATA KUNCI: HAM, Korea Utara, Pelanggaran

I. PENDAHULUAN

Korea Utara telah lama dikecam oleh masyarakat internasional. Negara tersebut dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pemerintahan otoriter dan tertutup, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai kondisi HAM di negara tersebut. Namun, berdasarkan laporan dari organisasi hak asasi manusia, situasi pelanggaran HAM di Korea Utara sangat serius dan meluas. Rezim otoriter dan tertutup di Korea Utara telah mengambil tindakan keras terhadap siapa pun yang dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaannya, termasuk warga negaranya sendiri. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Korea Utara meliputi kebebasan berekspresi, hak kesehatan, hak makan, hak beragama, hak bekerja, serta hak untuk tidak disiksa dan ditahan tanpa alasan yang jelas.

Salah satu contoh pelanggaran HAM yang paling terkenal dan kontroversial di Korea Utara adalah pemindahan paksa warga ke kamp-kamp kerja paksa dan kamp-kamp konsentrasi. Di sana, warga yang dianggap sebagai ancaman bagi rezim diisolasi, disiksa, dan diberikan sedikit atau bahkan tidak ada hak asasi manusia. Pemindahan paksa tersebut sering kali dilakukan tanpa proses hukum yang adil dan merupakan pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang layak dan kebebasan dari perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi. Selain itu, pemerintah Korea Utara juga telah melakukan tindakan diskriminatif terhadap kelompok etnis dan agama tertentu, serta menindas kebebasan berekspresi dan pers yang bebas.

Sebagai salah satu negara paling terpencil di dunia, tidak mengherankan jika banyak aspek kehidupan Korea Utara tetap menjadi misteri bagi orang luar. Namun, kurangnya bantuan psikiater untuk kesehatan mental di Korea Utara didokumentasikan dengan baik dan dikuatkan oleh para pembelot. Menurut sebuah studi Korea Selatan tahun 2014 yang diterbitkan di National Library of Medicine, 76,3% pembelot Korea Utara menderita penyakit mental yang biasanya tidak diobati di tanah air mereka. Berbeda dengan pandangan Barat tentang kesehatan mental sebagai masalah kesehatan yang harus ditangani oleh profesional medis,

masyarakat Korea Utara melihat masalah kesehatan mental sebagai produk sampingan dari kurangnya dukungan individu terhadap ideologi “revolusioner” bangsa. (Brancato, 2022)

Penyakit mental terjadi akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan. Penyakit mental juga dapat terjadi akibat dari lingkungan sosial. Penyakit mental menjadi perhatian serius, karena hal tersebut berdampak langsung terhadap tubuh kita. Penyakit mental tidak hanya terjadi pada kalangan tertentu saja, melainkan seluruh kalangan kemungkinan juga dapat mengalaminya. Penyakit mental dapat berupa stress, gangguan kecemasan, bahkan depresi yang dapat membuat orang yang mengalaminya melukai diri sendiri. Penyakit mental juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dikarenakan orang yang mengalami penyakit mental biasanya sulit tidur dan sulit berkonsentrasi, sehingga hal tersebut dapat mengurangi performa kita dalam melakukan suatu aktivitas.

Maka dari itu Membahas pelanggaran HAM dan korelasinya dengan kesehatan mental di Korea Utara menjadi sangat signifikan karena setiap orang berhak untuk hidup dan sehat dengan martabat yang sama dan tidak ada negara yang boleh memperlakukan rakyatnya dengan cara yang tidak manusiawi. Dapat dibandingkan dengan situasi di negara-negara lain, seperti Afrika Selatan pada masa apartheid atau Jerman pada masa Nazi, yang menunjukkan betapa pentingnya masyarakat internasional untuk memperhatikan dan menangani kasus pelanggaran HAM di Korea Utara. Dengan membahas dan menyoroti isu ini, diharapkan dapat mendorong perubahan yang lebih baik bagi warga Korea Utara.

Permasalahan ini telah diteliti oleh banyak peneliti, akan tetapi terdapat 3 jurnal yang paling relevan dengan persoalan ini dalam konteks tujuan yang sama.

Pertama, "The Human Rights Situation in North Korea" oleh the United Nations

"The Human Rights Situation in North Korea" adalah laporan yang diterbitkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2014. Laporan ini menyoroti berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Korea Utara, termasuk pelanggaran hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta kebebasan dari perlakuan tidak manusiawi dan diskriminasi. Laporan ini juga membahas penggunaan kamp kerja paksa dan pemusnahan kelompok-kelompok tertentu, seperti kelompok etnis dan agama minoritas. Laporan ini menganjurkan agar pemerintah Korea Utara memperbaiki situasi HAM di negaranya dan meminta dukungan dari masyarakat internasional untuk mencapai tujuan ini.

Kedua, "North Korea: A Case Study in Totalitarianism" oleh Anna Broinowski

"North Korea: A Case Study in Totalitarianism" adalah sebuah artikel yang ditulis oleh Anna Broinowski pada tahun 2015. Artikel ini membahas bagaimana rezim Kim di Korea Utara digambarkan sebagai contoh paling ekstrim dari sistem totaliter di dunia saat ini. Artikel ini membahas bagaimana pemerintah Korea Utara mengendalikan seluruh aspek kehidupan rakyatnya melalui propaganda, kontrol informasi, dan penggunaan kekerasan. Artikel ini juga membahas bagaimana pemerintah Korea Utara menggunakan seni, media, dan teknologi untuk memperkuat kontrolnya atas masyarakatnya. Broinowski menganjurkan agar masyarakat internasional memahami dengan lebih baik sistem totaliter di Korea Utara dan mengambil tindakan untuk mempromosikan kebebasan dan hak asasi manusia di negara tersebut.

Ketiga, "White Paper on Human Rights In North Korea" oleh Kyuchang Lee, Sookyung Kim, Jin Sun Yee, Eun Mee Jeong, Yejoon Rim

"White Paper on Human Rights in North Korea" merupakan sebuah artikel yang ditulis oleh beberapa penulis asal Korea. Artikel ini membahas tentang hak masyarakat Korea Utara belum terlindungi dengan baik, kondisi dimana tingginya tingkat eksekusi hukuman mati yang dilakukan untuk kasus kejahatan seperti pembunuhan, menonton dan mendistribusikan rekaman Korea Selatan, serta kasus seperti

menyebarkan agama di negara tersebut. Artikel ini juga membahas tentang kebebasan masyarakat untuk bergerak yang sangat dibatasi terutama akses ke area tertentu dan pemerintah juga melanggar hak privasi masyarakat dengan melakukan penggeledahan secara ilegal dan melakukan penindasan terhadap masyarakatnya yang menganut agama kristen. Artikel ini menyarankan agar pemerintah Korea utara mengubah sistem pemerintahan yang ada karena banyak negara yang menentang sistem pemerintahan tersebut.

Dari ketiga penelitian tersebut mengenai HAM di Korea Utara, terdapat 1 aspek yang belum diteliti dan belum ada penelitian yang mendeskripsikan terkait penelitian psikologi masyarakat Korea Utara. Maka dari itu, kami mencoba untuk menelitinya.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah kami paparkan, tujuan penelitian kami mengenai psikologi masyarakat Korea Utara, yaitu bertujuan untuk mengetahui kondisi psikologi masyarakat Korea Utara, khususnya masyarakat yang pernah mengalami atau merasakan tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Korea Utara maupun masyarakat lainnya, seperti perempuan dan anak-anak.

II. METODE

Jurnal ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami, menggali, dan menginterpretasi fenomena atau masalah penelitian dengan mengandalkan data berupa kata-kata, narasi, atau gambar, serta fokus pada pengertian yang dalam dan makna dari suatu fenomena. Pendekatan yang digunakan berdasarkan sosio-legal, yang dianalisis secara deskriptif dan analitis serta normatif berdasarkan bahan penelitian primer dan sekunder. Lalu jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan, berdasarkan bahan penelitian primer dan sekunder dengan sumber studi literatur/kepustakaan.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Sejarah Korea Utara

Korea Utara dikenal sebagai negara tertutup, Korea Utara mengatur segala aturan pemerintahannya dalam konstitusi yang ketat. Pada tahun 1948, Democratic People's Republic of Korea (DPRK) mengeluarkan konstitusi pertamanya. Konstitusi ini lalu diganti dengan konstitusi baru pada tahun 1972. Revisi kemudian dilakukan pada tahun 1992, 1998, 2009, dan 2016. Amandemen 1998 dibuat pada tahun-tahun setelah kematian Kim Il Sung yang merupakan pemimpin negara tersebut dari tahun 1948 hingga kematiannya pada tahun 1994. Pembukaan ditambahkan untuk menekankan kesinambungan dengan rezim sebelumnya dikarenakan amandemen ini sangat luas. (Reditya, 2021)

Dalam amandemen, pembukaan menyimpulkan bahwa “Konstitusi Sosialis Democratic People's Republic of Korea (DPRK) adalah konstitusi Kim Il Sung yang secara hukum mewujudkan ideologi dan prestasi konstruksi negara Juche Kamerad Kim Il Sung.” Lalu pada revisi konstitusional 2009, otoritas administratif tertinggi negara, pemimpin tertinggi, dan ketua National Defense Commission (NDC) atau dalam bahasa Indonesia disebut Komisi Pertahanan Nasional dipegang Kim Jong Il yang merupakan putra dari Kim Il Sung. Hingga kematiannya pada tahun 2011, penerus Kim Jong Il, yakni putranya yang bernama Kim Jong Un menggantikan posisinya sebagai pemimpin. Revisi berikutnya, pada tahun 2016 membentuk Komisi Urusan Negara yang merupakan sebuah badan baru yang menggantikan NDC. Komisi Urusan Negara ini menjadi entitas pemerintah tertinggi dan mewakili perluasan kekuasaan yang diberikan kepada Kim sebagai ketuanya. (Reditya, 2021)

Di Korea Utara, perdana menteri bertanggung jawab atas pemerintahan. Perdana menteri dibantu oleh beberapa wakil perdana menteri dan kabinet, yang anggotanya ditunjuk oleh legislatif nasional. Legislatif nasional Korea Utara dikenal dengan nama Supreme People's Assembly (SPA) atau dalam Bahasa Indonesia disebut Majelis Rakyat Tertinggi.

Presiden Supreme People's Assembly (SPA) adalah kepala negara tituler Korea Utara. Namun dalam praktiknya, pemerintah berada di bawah kepemimpinan satu orang. Selama masa hidupnya, Kim Jong Il juga merupakan panglima tertinggi Tentara Rakyat Korea dan juga merupakan sekretaris jenderal Korean Workers' Party (KWP) atau dalam Bahasa Indonesia disebut Partai Pekerja Korea. Setelah kematiannya, Kim Jong Un mengambil posisi itu, dan dia diangkat menjadi ketua Komisi Urusan Negara pada saat awal pembentukannya. (Reditya, 2021)

B. Sejarah HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan istilah dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. (Arifin, 2019, 1) Hak Asasi Manusia (HAM), meliputi kebebasan dan hak dasar bagi setiap orang, terlepas dari kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berbicara merupakan contoh hak asasi manusia. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja dan hak atas pendidikan. Hukum dan perjanjian internasional dan nasional mendukung dan melindungi hak asasi manusia. Sistem internasional untuk melindungi hak asasi manusia didasarkan pada Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau dalam Bahasa Indonesia disebut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pada 10 Desember 1948, deklarasi tersebut disetujui oleh Sidang Umum PBB untuk menghentikan kengerian Perang Dunia II agar tidak berlanjut. 30 pasal Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menetapkan hak sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya semua orang. Ini merupakan konsep martabat manusia yang melampaui batas dan kekuatan politik dan menuntut pemerintah untuk menegakkan hak-hak dasar setiap orang. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) merupakan pedoman

di seluruh pekerjaan Amnesty International. (Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2020)

C. Jenis-jenis HAM

1. Hak atas informasi

Hak atas informasi merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Hak atas informasi dapat dipahami sebagai wujud pertanggungjawaban negara terhadap rakyat untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mendapatkan informasi tentang kinerja para petinggi negara dan mendorong partisipasi popular dalam pemerintahan, dengan tujuan untuk pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. (TRANSPARENCY INTERNATIONAL, n.d.)

Contoh pelanggaran hak atas informasi

Penutupan perbatasan akibat pandemi Covid-19 semakin membatasi akses masyarakat Korea Utara terhadap informasi dari luar negeri. Kehadiran militer di sepanjang perbatasan dan penggunaan kamera CCTV dan detektor gerakan membuat sulitnya informasi masuk ke negara tersebut. Sejak diperkenalkannya Undang-Undang Penolakan Pemikiran dan Budaya Reaksioner pada Desember 2020, tindakan keras dan hukuman terus diterapkan untuk mengakses informasi asing. Remaja dilaporkan dieksekusi karena menonton dan berbagi acara TV Korea Selatan. Meskipun penggunaan ponsel menjadi lebih umum, akses ke layanan telepon seluler internasional sangat dibatasi di seluruh negeri. Panggilan ke luar negeri hampir sepenuhnya diblokir, hanya sejumlah kecil elit penguasa yang diizinkan menggunakan internet. (TRANSPARENCY INTERNATIONAL, n.d.)

2. Hak atas kesehatan

Hak atas kesehatan merupakan bagian dari ham yang memiliki definisi kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara ekonomis. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa depannya. Singkatnya, seseorang tidak bisa menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia. Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain telah diakui secara internasional. Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak. Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi di luar kekuasaannya. Ibu dan anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama. (Afandi, 2008, 2)

Contoh pelanggaran hak atas kesehatan

Anak- anak yang berada di Korea Utara menderita kekurangan gizi, menurut Unicef, 200.000 anak anak korea utara menderita kekurangan gizi akut dimana 60.000 diantaranya akan menjadi “kurang gizi parah”. Hal tersebut terjadi karena pemerintah Korea Utara yang mengalokasikan dana yang sangat besar untuk

mengembangkan senjata nuklir dan kemampuan rudal canggih. Menurut perkiraan, pemerintah Korea Selatan menghabiskan lebih dari \$2 juta untuk meluncurkan 71 rudal pada tahun 2022. Ini cukup untuk membeli lebih dari 500.000 ton beras, yang dapat menyediakan cukup makanan bagi penduduk Korea Utara selama 46 hari. Jumlah yang sama juga akan menutupi lebih dari 60% dari perkiraan kekurangan makanan Korea Utara sebesar 800.000 ton pada tahun 2023. Dalam usahanya mengejar senjata nuklir dan rudal balistik, rezim Korea Utara telah menunjukkan ketidakpedulian terhadap hak asasi manusia penduduknya. (Nebehay, 2018)

3. Hak atas makanan, air dan sanitasi

Hak atas makanan merupakan hak asasi manusia yang diakui di bawah hukum internasional yang memberikan hak kepada individu untuk mengakses makanan yang memadai dan sumber daya yang diperlukan untuk kenikmatan berkelanjutan ketahanan pangan. Hak atas makanan menghendaki semua manusia untuk hidup bermartabat, bebas dari kelaparan, kerawanan pangan, dan gizi buruk, hak atas makanan bukan tentang amal atau bagaimana memberi makanan kepada rakyat, tetapi tentang memastikan bahwa semua orang memiliki kapasitas untuk memberi makan diri mereka sendiri dengan cara- cara yang bermartabat. (Sastraatmadja, 2022)

Hak atas air adalah penggunaan air atau sumber air. Setiap harinya, baik negara besar maupun komunitas kecil, harus memutuskan cara untuk membagi sumber air yang tersedia. Seperti ketika berkemah, individu, kota, dan negara melakukan negosiasi untuk menentukan siapa yang berhak atas air di wilayah suatu negara atau dalam batas wilayahnya. (Literasi Online, 2021)

Hak atas sanitasi

Sanitasi adalah tindakan yang disengaja dalam membudayakan hidup bersih yang bertujuan untuk mencegah manusia agar tidak

bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya, yang melalui upaya ini diharapkan bisa menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. (Materi IPA, 2022)

Contoh Kasus Pelanggaran Hak atas makanan, air dan sanitasi

Lebih dari 40% populasi kekurangan gizi dan membutuhkan bantuan kemanusiaan. Banyak orang menderita kekurangan gizi kronis. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali menunjuk Korea Utara sebagai negara yang membutuhkan bantuan pangan eksternal. Kereta barang lintas batas antara China dan Korea Utara beroperasi sesekali, tetapi pada frekuensi yang lebih rendah daripada sebelum Covid-19. Aliran masuk pangan dari luar negeri melalui impor dan bantuan dari masyarakat internasional masih lebih rendah dibandingkan sebelum Covid-19. Ada laporan bahwa pihak berwenang Korea Utara telah meminta bantuan makanan dari negara-negara termasuk India dan Vietnam. Bencana alam yang berkelanjutan seperti kekeringan musim semi dan topan musim panas dilaporkan telah memperparah rendahnya produktivitas di sektor pertanian. Sebagai bagian dari kebijakan karantina, penyelundupan di perbatasan antara Korea Utara dan China sangat dilarang. Penyelundupan oleh beberapa individu tampaknya terus berlanjut dan ada laporan bahwa penyelundupan tidak resmi yang dipimpin oleh negara juga dilakukan secara diam-diam. Kekurangan pangan yang dihadapi oleh kelompok yang terpinggirkan, seperti penyandang disabilitas, anak-anak, orang lanjut usia, dan mereka yang tinggal di luar kota, sangat serius. Fasilitas pasokan air dan sistem pembuangan limbah buruk di banyak daerah.

4. Hak ekonomi, sosial dan budaya

Hak ekonomi merupakan salah satu bagian dari ham yaitu hak untuk melakukan kegiatan perekonomian, perburuhan, hak memperoleh pekerjaan, dimana anggota masyarakat berhak untuk memiliki kekayaan dan perlindungan akan harta benda yang telah

dimiliki, memperoleh kehidupan yang layak dengan mendapat kesempatan kerja yang layak, serta berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan negara dan menikmati hasil dari pembangunan negara. (Winoto, n.d.)

Hak asasi manusia bidang sosial dan budaya merupakan hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak atas jaminan sosial, hak atas perumahan serta hak atas pembelajaran. (Nurqomah, n.d., #)

Contoh Kasus Pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya

Ribuan pekerja migran Korea Utara yang bekerja di lokasi konstruksi di Qatar, tun rumah Piala Dunia 2022. Sebanyak 2.800 pekerja Korea Utara terdaftar di pemerintah Qatar, Berdasarkan kesaksian pekerja dan pembelot lokal Korea Utara, media melaporkan bahwa pemerintah Korea Utara telah mengambil lebih dari 90% gaji pekerjaannya di Qatar selama tiga tahun terakhir. Para pekerja ini bekerja dengan harapan bahwa mereka akan dapat mengumpulkan upah mereka ketika mereka ketika mereka kembali ke negara asal mereka, tetapi pada kenyataannya mereka menerima kurang dari 10% dari upah mereka, atau tidak sama sekali. "Kami di sini untuk mendapatkan mata uang asing bagi pemerintah," kata seorang pekerja Korea Utara di sebuah lokasi konstruksi di ibu kota Doha. Bagi Korea Utara yang terkena sanksi oleh masyarakat internasional karena masalah program nuklir dan hak asasi manusia, sumber utama devisa adalah uang yang diperoleh pekerja Korea Utara di luar negeri. Diketahui ada empat lokasi konstruksi tempat pekerja Korea Utara bekerja di kota baru Lujail, Qatar, tempat final Piala Dunia 2022 akan digelar. Namun, belum dipastikan apakah lokasi pembangunan yang mereka tempati merupakan lokasi pembangunan Stadion Piala Dunia. "Biasanya orang-orang seperti kami tidak dibayar," kata seorang pekerja Korea Utara yang saya temui di salah satu lokasi konstruksi Luzail kepada The Guardian. "Tidak ada uang pribadi langsung masuk." The Guardian melaporkan bahwa pekerja Korea Utara mulai bekerja di pagi hari dan tinggal lama setelah warga negara lain meninggalkan

lokasi, bekerja sampai malam. Aidan McQuaid, CEO Organisasi Internasional Melawan Perbudakan dan Buruh (ASI), sebuah kelompok hak asasi manusia, mengkritik pekerja Korea Utara di Qatar sebagai "kerja paksa yang dipimpin pemerintah", mengutip pemerasan upah dan intensitas tenaga kerja yang berlebihan. Menurut organisasi pengungsi Korea Utara, ada total 65.000 pekerja Korea Utara di seluruh dunia, terutama di Rusia, China, Mongolia, dan Timur Tengah. (Lee, 2014)

5. Hak atas Kebebasan

Hak atas kebebasan merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu untuk melakukan tindakan, membuat keputusan, atau menyatakan pendapat tanpa adanya campur tangan atau tekanan dari pihak lain, selama tindakan tersebut tidak melanggar hak orang lain atau merugikan kepentingan umum.

Contoh kasus pelanggaran hak kebebasan

a. Kebebasan bertindak

Pemerintah Korea Utara telah menutup perbatasannya selama tiga tahun karena pandemi Covid-19 dan memberlakukan karantina serta kontrol pergerakan di beberapa daerah. Akibat kebijakan karantina, pergerakan orang dan barang antar daerah masih terbatas. Meskipun demikian, sejumlah warga Korea Utara berhasil melarikan diri ke Korea Selatan, meski jumlahnya terbilang rendah. Banyak dari mereka telah pindah ke negara lain seperti China sebelum pandemi dan kemudian masuk ke Korea Selatan. Namun, akibat kontrol perbatasan yang ketat, tidak ada LSM atau media independen yang hadir untuk memantau implikasi dari pembatasan tersebut, termasuk dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi dan ruang sipil. (AMNESTY INTERNATIONAL, n.d.)

b. Penindasan perbedaan pendapat

Kritik terhadap otoritas atau kepemimpinan dilarang dan bisa mengakibatkan penahanan atas alasan politik. Keberadaan empat kamp penjara politik (kwanliso) tetap dipertanyakan, meskipun pihak berwenang membantahnya. Ribuan tahanan, diduga mencapai 120.000 orang, diperlakukan dengan kerja paksa, penyiksaan, dan perlakuan buruk lainnya. (AMNESTY INTERNATIONAL, n.d.)

c. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang

Jumlah penangkapan dan penahanan diyakini meningkat, termasuk atas pelanggaran aturan karantina, penyelundupan, isolasi, perjalanan lintas batas, penggunaan narkoba, keterlibatan dalam praktik keagamaan yang tidak diterima pihak berwenang, dan akses terhadap informasi asing. (AMNESTY INTERNATIONAL, n.d.)

D. Dampak psikologis dari pelanggaran HAM di Korea Utara

1. Masalah medis salah didiagnosis sebagai masalah politik

Di kalangan elit dan mereka yang miskin, kondisi kesehatan mental di Korea Utara cenderung tidak tertangani dan tidak ada konselor dan psikoterapis. Alih-alih secara klinis mengobati kesehatan mental di Korea Utara dengan konseling, rekan senegarannya memandang mereka yang memiliki masalah kesehatan mental sebagai pembangkang yang tidak setia pada ideologi Korea Utara. Akibat stigmatisasi tersebut, kesehatan mental menjadi topik yang sangat tabu di masyarakat Korea Utara. (Brancato, 2022)

2. Rumah Sakit Nomor 49

Meskipun Korea Utara tidak menggunakan psikiatri atau konseling untuk mengobati penyakit jiwa, mereka yang dianggap sakit jiwa ditempatkan di “ Rumah Sakit Nomor 49 ” atas permintaan keluarga mereka. Fasilitas ini mempraktikkan teknik kuno seperti terapi koma insulin, di mana anggota staf menyuntikkan "subjek"

dengan insulin dosis tinggi untuk menciptakan keadaan seperti koma yang berlangsung selama sehari-hari. Stigma seputar penduduk “49” juga menyebabkan masyarakat Korea Utara mencap orang-orang ini sebagai orang buangan. Akibatnya, keluarga dengan kerabat di fasilitas “49” sering kehilangan status sosial politik karena stigma. (Brancato, 2022)

3. Trauma Pembela

Menurut profesor Universitas Dankook Jin-Won Noh dan psikiater Pusat Medis Nasional So Hee Lee pada Oktober 2020, “Sejarah Trauma dan Kesehatan Mental Pembelot Korea Utara,” hanya 5% pembelot dewasa Korea Utara yang tidak terpapar trauma saat berada di Korea Utara. Dari 95% yang berurusan dengan peristiwa traumatis di Utara, jenis trauma yang paling umum berasal dari menyaksikan eksekusi pemerintah, menahan kelaparan, kematian keluarga dan teman terkait kelaparan, menyaksikan serangan fisik yang ekstrim dan “melarikan diri dari penangkapan setelah pembelotan.” Para pembelot Korea Utara juga kesulitan berasimilasi dengan masyarakat Korea Selatan karena perbedaan budaya dan bahasa. (Brancato, 2022)

4. Efek Jangka Panjang dari Arduous March

Kelaparan Korea Utara pada 1990-an menyebabkan korban jiwa yang sangat besar, dengan jutaan warga meninggal karena kelaparan. Bantuan internasional yang diberikan kepada warga Korea Utara selama Arduous March juga secara langsung menggerogoti klaim kemandirian dan isolasi total pemerintah Korea Utara. Namun, pengaruhnya terhadap kesehatan mental bersifat jangka panjang, dengan pengalaman traumatis yang terkait dengan kecanduan narkoba dan penyakit mental di kalangan warga Korea Utara. Misalnya, Lee Kwan-Hyung, seorang peneliti dari Pusat Basis Data untuk Hak Asasi Manusia Korea Utara yang berbasis di Seoul, memperkirakan bahwa 30% warga Korea Utara menggunakan narkoba pada tahun 2016, dengan metamfetamin

dan opioid yang paling umum. Karena sifat penekan nafsu makannya, penggunaan metamfetamin melonjak selama kelaparan Korea Utara tahun 1990-an. (Brancato, 2022)

5. Efek malnutrisi pada otak

Antara 2018 dan 2020, 42% warga Korea Utara mengalami kekurangan gizi. Kerawanan pangan yang ekstrim ini juga memiliki efek yang sangat merusak kesehatan mental dan perkembangan otak. Misalnya, kekurangan gizi terkait dengan masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan kesulitan konsentrasi. (Brancato, 2022)

6. Organisasi yang Bertujuan untuk Membantu

Karena sifatnya yang isolasionis, organisasi di luar Korea Utara tidak dapat memberikan konseling kesehatan mental kepada warga negara Korea Utara yang tinggal di Korea Utara. Namun, ada kelompok seperti Crossing Borders yang memberikan bantuan kepada para pembelot Korea Utara yang menyeberang ke China. Meskipun Crossing Borders adalah kelompok berbasis agama, mereka juga melakukan tugas sekuler seperti memberikan dukungan medis, tempat tinggal, konseling dan keamanan bagi pengungsi yang berisiko diperdagangkan atau dianiaya. (Brancato, 2022)

IV. KESIMPULAN

Kondisi HAM di Korea Utara hingga saat ini masih memprihatinkan. Masih banyak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Korea Utara, seperti kebebasan berpendapat, kondisi penahanan yang tidak manusiawi, adanya kerja paksa yang diperuntukkan untuk anak dibawah umur, bahkan penangkapan paksa yang dilakukan oleh pemerintah tanpa sebab. Tidak hanya itu, masalah ekonomi juga marak terjadi di Korea Utara. Banyak warga negara Korea Utara yang dipaksa bekerja oleh pemerintah Korea Utara dan dibayar dengan upah yang

sangat minim sehingga mengakibatkan banyak warga negara Korea Utara yang mengalami kesulitan dalam hal perekonomian.

Dampak dari kesulitan perekonomian yang terjadi di Korea Utara menyebabkan terdapat beberapa warga negara Korea Utara yang terpaksa melakukan pekerjaan ilegal, seperti pencurian, penyelundupan barang ilegal, serta produksi hingga menjual narkoba hanya untuk bertahan hidup. Hal tersebut berdampak pada kesehatan mental warga negaranya yang menurun. Dampak kesehatan mental yang terjadi pada warga negara Korea Utara, seperti masalah medis salah didiagnosis sebagai masalah politik, “Rumah Sakit Nomor 49”, trauma pembela, efek jangka panjang dari Arduous March, efek malnutrisi pada otak, dan organisasi yang bertujuan untuk membantu. Maka dari itu, persoalan HAM bukan hanya persoalan fisik saja, melainkan kesehatan mental juga perlu diperhatikan secara serius.

DAFTAR REFERENSI

Afandi, D. (2008, Maret). Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM. Jurnal Ilmu Kedokteran, 2. <http://fk.unri.ac.id/wp-content/uploads/2017/11/Hak-atas-kesehatan-dalam-perspective-HAM.pdf>

AMNESTY INTERNATIONAL. (n.d.). NORTH KOREA 2022. AMNESTY INTERNATIONAL. Retrieved April 4, 2023, from <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/east-asia/north-korea/report-korea-democratic-peoples-republic-of/>

Arifin, F. (2019). HAK ASASI MANUSIA. Jurnal Hukum dan HAM, 1. <file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/HAM.pdf>

Brancato, S. (2022, August 22). 6 Facts about Mental Health in North Korea. The Borgen Project. Retrieved Maret 16, 2023, from <https://borgenproject.org/mental-health-in-north-korea/>

Broinowski, A. (2015). North Korea: A Case Study in Totalitarianism. Jurnal Hukum dan HAM. <https://pdfgoes.com/download/1178750-North%20Korea%20On%20The%20Inside%20Looking%20In.pdf>

Fakultas Hukum Universitas Medan Area. (2020, September 17). What are Human Rights? What are Human Rights? Retrieved Februari 22, 2023, from <https://hukum.uma.ac.id/2020/09/17/apa-itu-hak-asasi-manusia/>

Lee, K. C., Kim, S. K., Yee, J. S., Jeong, E. M., & Rim, Y. J. (2020, September). White Paper on Human Rights In North Korea. Jurnal Hukum dan HAM. <file:///C:/Users/a46cb/Downloads/white%20paper%20human%20rights%20north%20korea%202020.pdf>

Lee, Y. (2014, November 8). Ribuan pekerja Korea Utara 'memperbudak' di lokasi konstruksi Qatar. 연합뉴스. Retrieved April 21, 2023, from <https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0007235582?sid=100>

Literasi Online. (2021, Juni 2). Hak Atas Air. Literasi Online. Retrieved Mei 9, 2023, from <https://www.literasionline.com/hak-atas-air>

Materi IPA. (2022, Januari 13). Pengertian Sanitasi, Ruang Lingkup, Ciri, Macam, Manfaat, dan Contohnya. GuruSains.Com. Retrieved Mei 5, 2023, from <https://gurusains.com/pengertian-sanitasi/>

Nebehay, S. (2018, Januari 30). 60,000 North Korean children may starve, sanctions slow aid: UNICEF. REUTERS. Retrieved Mei 5, 2023, from <https://www.reuters.com/article/cnews-us-northkorea-missiles-un-children-idCAKBN1FJ1FL-OCATP>

Nurqomah, R. (n.d.). HAK ASASI MANUSIA DI BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA. Jurnal Hukum dan HAM. file:///C:/Users/a46cb/Downloads/Resty%20Nurqomah%202010128220014.pdf

Reditya, T. H. (2021, November 21). Sistem Pemerintahan Korea Utara, Menghamba pada Juche dan Satu Partai. kompas.com. <https://internasional.kompas.com/read/2021/11/21/060000870/sistem-pemerintahan-korea-utara-menghamba-pada-juche-dan-satu-partai?page=all>

Ryu, E. (2018). Human Rights Situation in North Korea: Lack of Significant Progress from the United Nations Human Rights Mechanisms and What Can be Done. Minnesota Journal of International Law. <https://scholarship.law.umn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1327&context=mjil>

Sastraatmadja, E. (2022, Oktober 31). Hak atas pangan sebagai hak asasi manusia. ANTARA. <https://www.antaranews.com/berita/3214425/hak-atas-pangan-sebagai-hak-asasi-manusia#:~:text=Hak%20atas%20pangan%20dan%20ragamnya,pangan%2C%20dan%20memenuhi%20kebutuhan%20diet>

TRANSPARENCY INTERNATIONAL. (n.d.). RIGHT TO INFORMATION. TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Retrieved April 21, 2023, from [https://www.transparency.org/en/our-priorities/right-to-information#:~:text=Access%20to%20information%20gives%20you,to%20Information%20laws%20\(ROI\)](https://www.transparency.org/en/our-priorities/right-to-information#:~:text=Access%20to%20information%20gives%20you,to%20Information%20laws%20(ROI))

Winoto, S. (n.d.). HAK ASASI MANUSIA. HAK ASASI MANUSIA. Retrieved April 21, 2023, from <http://jdih.klatenkab.go.id/v1/wp-content/uploads/2020/03/HAK-ASASI-MANUSIA-PAK-WINOTO.pdf>